

RINGKASAN

Mohammad Hasan Akbar 2025, **Analisis Pengadaan Cek Tarif Dan Pembayaran Reklame Dalam Upaya Meminimalisir Pelanggaran Izin Di Kota Probolinggo Tahun 2024 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo)**. Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si, Eko Yudianto Yunus, S.Sos., M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perizinan dan pemungutan pajak reklame di Kota Probolinggo, dengan menyoroti keterlibatan stakeholder, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki perangkat hukum seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur reklame, namun di lapangan masih dijumpai berbagai bentuk pelanggaran, seperti pemasangan reklame tanpa izin, tidak membayar pajak, hingga ketidaksesuaian lokasi pemasangan dengan zona yang ditentukan.

Dari sisi teknis dan kelembagaan, perizinan dan pengawasan reklame melibatkan berbagai instansi, termasuk DPMPTSP, BPKPD, dan Satpol PP. Namun, terbatasnya SDM khusus yang menangani reklame serta belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas secara konsisten. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan perangkat digital lapangan, sistem database terintegrasi, serta kendaraan operasional, turut menghambat efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak reklame.

Kata kunci : Reklame, Perizinan, Pajak